

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2024**

NO	URAIAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
<b>KEARSIPAN</b>					
1,	Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 H UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama Undang-Undang Berlaku	Data Pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
2,	Arsip Dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan : a. Dokumen keuangan : SPJ berikut lampirannya b. Dokumen Anggaran dan otorisasinya c. Surat pencairan anggaran d. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ; 2. UU. No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat ( 1 ) dan ( 2 )	Selama Undang-Undang Berlaku  Selama Undang-Undang Berlaku	menghambat proses penegakan hukum  mengganggu proses jalanya kegiatan	Menyediakan data lengkap yang dilindungi dalam proses penegakan hukum  melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
3,	Disposisi Surat Pimpinan	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama belum ada tindak lanjut dari pengelola Surat	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
<b>KEUANGAN</b>					
4,	Laporan keuangan yang belum diaudit	1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat ( 1 ) 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang sudah diaudit	mengambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5,	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya , review laporan keuangan	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	selama masih berlaku	menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
<b>KEPEGAWAIAN</b>					
8,	Rincian hasil uji kompetensi ASN/Pejabat	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	melindungi rahasia pribadi seorang ASN
9,	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h	sampai ada keputusan tetap	1. dapat menghambat proses penegakan hukum 2. mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	1. memperlancar proses penegakan hukum 2. menjaga rahasia pribadi seorang PNS
10,	Dokumen pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan /menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	mengamankan proses penyusunan kebijakan
11,	Dokumen Penilaian Kinerja PNS	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	1. dapat menghambat proses penyusunan kebijakan 2. mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	1. mengamankan proses penyusunan kebijakan 2. melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12,	Dokumen pengelolaan kepegawaian; (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, dan administrasi kepegawaian	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

TELEKOMUNIKASI					
13,	Kode Akses /password aplikasi elektronik	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE	Selama Undang-Undang Berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	keamanan data bisa terjaga dengan baik
14,	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapan yang membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
15,	Berita / Radiogram Rahasia	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapan yang membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara
16,	Jalur Komunikasi VVIP	UU. No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapan yang membahayakan keamanan negara	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	melindungi pertahanan dan keamanan negara

Madiun, Januari 2024



Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Madiun

**H. WAHYUDI**  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19671106 1990 03 1 009